



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

NORDI ILHAMI

11524104165

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

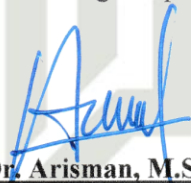
Skripsi dengan judul **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif fiqh siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : **NORDI ILHAMI**
Nim : 11524104165
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. Arisman, M.Sy.
NIP : 13011205

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Nama Panulis : **NORDI ILHAMI**
NIM : 11524104165
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 15 Juni 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,
Tim Penguji

2020



1. H. Rahman Alwi, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Irfan Zulfikar, M.Ag
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Arisman, M.Sy.
(Anggota Penguji)
4. Haswir, M.Ag
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu faktornya yaitu kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari tugas dan wewenang tersebut belum sepenuhnya dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Kemudian untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan wewenang Kepala desa menurut UU. No. 6/2014.

Adapun jenis penelitian ini adalah peneltian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan siyasah. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu kedudukan kepala desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 sebagai penyelenggara pemerintahan desa sekaligus kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 undang-undang no.6/2014 tentang tugas kepala desa yaitu, penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014 sudah sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yang mana tugas dan wewenang yang diberikaan kepada seorang pemimpin itu merupakan sebuah amanat, dan juga memimpin itu berarti siap melayani masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad saw, berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Analisis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Perspektif *Fiqh Siyasa*”. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Ayahanda tercinta (Maranis), ibunda terkasih (Megawati,S.Pd) serta seluruh keluarga besar, yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Untuk kakakku (Novika Putri) dan dua orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adikku (Adristi Afdal, Aisyah Adriani) yang selalu memberikan do'a dan semangat.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Wakil Rektor I, II dan III, serta seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

5. Bapak Dr.Arisman, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Haswir, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 15 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

9. Kawan-kawan terdekat seperjuangan, Sinta Rahayu Nst, Widya Dwiguna, Imelda, Seni Angraini. yang sering menghibur dan memberikan motivasi ketika penulis mengalami masalah. Semoga persahabatan kita tidak akan pudar dimakan waktu.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah swt. yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah swt. penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah swt. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Penulis

Nordi Ilhami

NIM. 115241041656

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

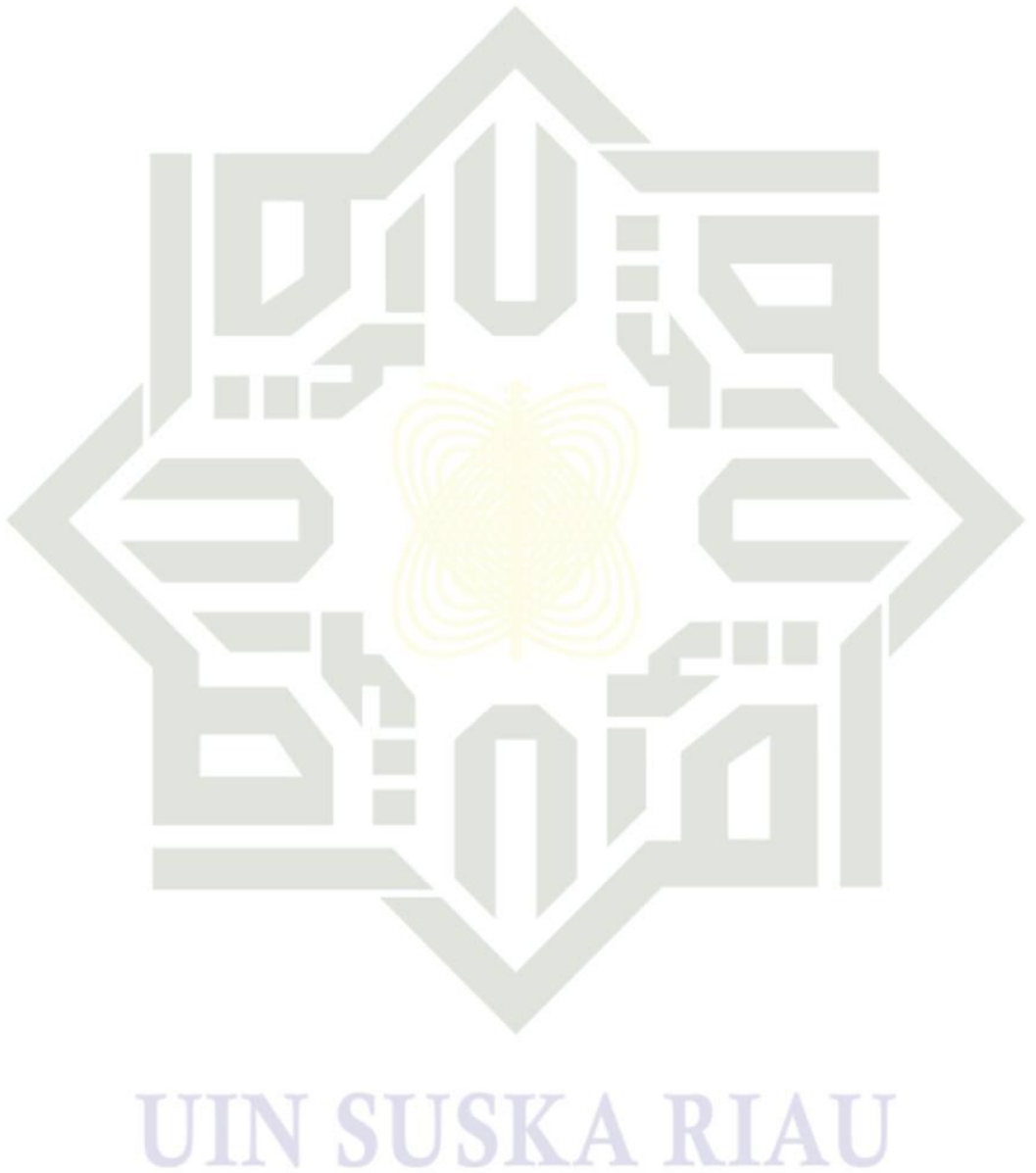
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II STRUKTUR DESA DAN ISI UU NOMOR 6 TAHUN 2014...	15
A. Struktur Pemerintahan Desa	15
1. Kepala Desa	16
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	16
3. Sekretaris Desa	17
4. Kepala Dusun.....	17
5. Kaur Pemerintahan	18
6. Kaur Pembangunan.....	18
7. Kaur Kesejahteraan Rakyat	19
8. Kaur Keuangan	19
9. Kaur Umum	20
B. Isi Undang-undang nomor 6 tahun 2014	21
BAB III KONSEP TEORITIS	42
A. Desa	42
1. Pengertian Desa	42
2. Sejarah terbentuknya Desa.....	45
3. Kedudukan Desa dalam Struktur Ketatanegaraan	48
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin.....	63
1. Hak Pemimpin	63
2. Tanggung Jawab Pemimpin.....	64
3. Pemerintahan Ideal	66
4. Otoritas dan Wewenang Pemimpin/Penguasa	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Kedudukan Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	71
1. Penyelenggara Pemerintahan Desa	71
2. Kepala Pemerintahan Desa Pemimpin Masyarakat	74
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	75
C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	84
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Merupakan Amanat.....	85
2. Memimpin Berarti Siap Melayani Masyarakat	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	94
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
	LAMPIRAN.....	99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kepemimpinan dalam kehidupan seorang muslim adalah suatu hal yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama, dalam menata kehidupan yang dinamis dan interaktif sudah pasti dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas melaksanakan, memandu dan membawa pekerjaan kearah tercapainya sasaran. Urgennya kepemimpinan, sehingga Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin walaupun dalam komunitas yang paling kecil sekalipun dan sasarannya sangat sederhana. Mengangkat seorang pemimpin dalam Islam merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab bersama agar memudahkan urusan kaum muslimin.¹

Sejarah menulis bahkan para sahabat Rasulullah saw. lebih memprioritaskan mengurus masalah suksesi kepemimpinan pasca Rasulullah saw. dibandingkan mengurus pemakaman Rasulullah saw. tersebut, artinya dalam berjama'ah tidak boleh ada kevakuman kepemimpinan sehingga harus ada yang harus dipilih untuk menjadi pemimpin. Sehingga mengangkat seorang pemimpin merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan agar memberikan manfa'at yang besar dalam melaksanakan pemerintahan dan urusan kaum-kaum muslimin. Pemimpin yang baik adalah kepemimpinan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya serta bertanggung jawab

¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pemimpinnya. Kepemimpinan juga yang mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya.²

Seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap yang dipimpinnya, karena hal tersebut merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu, di dalamnya ada dua pihak yang berperan penting yaitu yang memimpin dan yang dipimpin.³ Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan masyarakat yang terhormat, kuat dan sejahtera, masih dalam tataran impian.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surat An-Nisa'/4:58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

² Shahih Bin Ghanim As-Sadlan, *Aplikasi Syariat Islam* (Jakarta: Dar al-Falah, 2002) hlm.

³ Enita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal* (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*⁴

Pemimpin menjadi harapan dalam mensejahterakan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu, pergeseran harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan menjadi sumber pemuasan ambisi. Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

Prinsip-prinsip umum kepemimpinan dalam al-Qur'an sama dengan peraturan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang harus dimiliki oleh seseorang yang pantas dipilih berdasarkan berbagai kualifikasi atau karakteristik yang diperlukan agar dapat memenuhi kewajibannya. Baik biologis, psikologis, pendidikan, finansial, pengalaman, dan sebagainya. Prinsip ini berlaku dalam berbagai peringkat tatanan sosial termasuk keluarga, masyarakat luas dan kepemimpinan.⁵

Manusia diberi kemampuan termasuk akal serta pengetahuan sehingga akan mampu melaksanakan tugasnya selaku khalifah atau penguasa di bumi. Dengan indra dan kemampuan yang dikaruniakan Allah swt. ini manusia mempunyai kemampuan untuk memimpin, memelihara, dan membangun kehidupan di dunia. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi petunjuk

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), jilid 2 hlm 87

⁵ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Stain Ponorogo Press, 2008), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hanya untuk umat Islam, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Melalui petunjuk al-Qur'an maka kehidupan manusia akan berjalan dengan baik.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat dan kokoh, dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad saw. para sahabat dan khulafaur rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.

Kepemimpinan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kepemimpinan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Manusia selain berfungsi sebagai khalifah/pemimpin, juga bertugas untuk mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian manusia itu mempunyai fungsi ganda, sebagai khalifah dan sekaligus sebagai 'abd. Fungsi sebagai khalifah tertuju kepada pemegang amanah Allah untuk penguasaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian alam raya yang berujung kepada pemakmurannya. Sedangkan fungsi 'abd bertujuan kepada penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah swt.

Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan harus diwujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja. Seorang Raja misalnya, harus berusaha untuk berbuat seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin sesuai dengan perintah Allah swt. dalam memimpin rakyatnya sehingga rakyatnya hidup sejahtera. Sebaliknya, apabila Raja berlaku semena-mena, selalu bertindak sesuai kemauannya, bukan didasarkan peraturan yang ada, rakyat akan sengsara. Dengan kata lain, pemimpin harus menciptakan keharmonisan antara dirinya dengan rakyatnya sehingga ada timbal balik di antara keduanya.⁶

Pemimpin yang paling dekat dengan rakyatnya adalah kepala desa, Kepala desa sebagai pemimpin terkecil di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kepala desa juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang. Mengingat pemerintahan desa adalah unit terkecil dalam bagian integral pemerintahan nasional, pembahasan tentang tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu : (a) Menyelenggarakan pemerintahan desa. (b) melaksanakan pembangunan desa. (c) pembinaan kemasyarakatan desa. (d) pemberdayaan masyarakat desa.

Selain yang telah dijelaskan di atas tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang efektif dan efisien, termasuk di dalamnya

⁶ Rachmat Syafe'i, *al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000 M), hlm. 134-135.

adalah fungsi pelayanan administrasi aparat pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai efektifitas pelayanan aparat pemerintahan pada masyarakat yang diinginkan kepala desa harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cara memotivasi para pegawainya dan juga selalu berkomunikasi, agar para pegawainya menyadari bahwa mereka juga dibutuhkan dan tidak dibedakan, sehingga mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepuasan masyarakat. Kepala desa juga dibutuhkan untuk mengontrol kegiatan para pegawainya apakah berjalan dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Kepala desa dan pegawainya harus saling kerja sama dalam usaha pencapaian tersebut. Masing-masing dari mereka haruslah menyadari tugas dan tanggung jawabnya.

Dikutip dari sebuah jurnal tirto.id – Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Nata Irawan menilai pemerintah desa masih lemah dan menyisakan persoalan yang perlu dibenahi. “persoalan di desa yang pertama SDM, kemudian anggaran desa, koordinasi, dan infrastruktur,” kata Nata dalam sebuah seminar bertajuk ‘Mengkaji Peran Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sebagai Ujung Tombak Penyelenggara Pemerintah dalam Memperkuat Eksistensi Negara Kesatuan’ di kantor Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Saat ini, lanjut Nata, aparatur desa belum memenuhi harapan pemerintah karena belum memiliki pendidikan yang cukup. Bahkan masih ada perangkat desa yang berpendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP). Menurut Nata, koordinasi mutlak harus diperbaiki jika tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin pemerintahan desa berjalan carut marut, selain itu persoalan infrastruktur juga harus diperbaiki.

Faktor lainnya yang membuat pemerintahan desa masih terbilang lemah yaitu, kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari kewenangan desa belum sepenuhnya dijalankan, seperti tidak adanya pembinaan bagi masyarakat desa dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, serta kurangnya sosialisasi kepala desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian kepala desa juga tidak transparan dalam biaya pelaksanaan pembangunan desa. Karena itu lanjut Nata, Kemendagri membuat program pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi aparatur desa untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik.⁷

Dalam asumsi penulis kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU. No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa tersebut belum sepenuhnya dipahami apalagi dilaksanakan, karena dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014.

⁷ Abdul Aziz, *Pemerintah Desa Dinilai Masih Lemah*, <https://amp.tirto.id/pemerintah-desa-dinilai-masih-lemah-lAe>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai: “Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqh Siyasah”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014 ?
2. Apa saja Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Apa saja Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat diketahui dari segi teoretis dan segi praktis sebagaimana berikut, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

1. Agar masyarakat mengetahui Bagaimana Kedudukan Kepala Desa di dalam Pemerintahan Desa.
2. Menambah khazanah pemahaman mengenai Apa saja Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa terhadap para pembaca atau masyarakat pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu kepada para pembaca pada umumnya dan juga mampu memberikan ilmu kepada penulis pada khususnya, agar lebih mengetahui kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti berikut yang ingin melakukan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan tinjauan *fiqh siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu, sumber data primer, sekunder dan tersier.

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti: UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendesa Nomor 1 Tahun 2015.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder terdiri atas: buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara normatif dan hukum Islam. Pendekatan Normatif yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Kemudian digunakan pendekatan Hukum Islam yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur'ān dan hadits Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan model tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁸ Dalam studi kepustakaan, sumber data diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan ini penyusun berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari membaca buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hal yang dibahas dan publikasi lainnya.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan metode induktif kualitatif. Dengan menggunakan metode induktif kualitatif, akan dianalisis data secara khusus kemudian menghasilkan informasi yang bersifat umum.

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), jilid III hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terkait kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga menghasilkan konsep pengelolaan Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, yaitu:

- a. Menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b. Menganalisis hasil penelitian hukum dan/atau buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan pasal-pasal tentang kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- c. Mengaitkan pasal-pasal tentang kewenangan pemerintahan desa dengan hasil penelitian hukum dan/atau buku-buku hukum yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa, maka dalam penulisan ini penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : STRUKTUR DESA DAN ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai struktur pemerintahan desa, serta penjelasan tentang isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

BAB III : KONSEP TEORITIS

Pada bab ini akan dibagi ke dalam dua sub bab, yang masing-masing sub bab terdiri dari penjelasan tentang desa, yang berisikan: pengertian desa, sejarah terbentuknya desa dan kedudukan desa dalam struktur ketatanegaraan. Kemudian tugas dan tanggung jawab pemimpin, berisikan tentang: pemerintahan ideal, otoritas dan wewenang penguasa serta hak dan tanggung jawab pemimpin.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kedudukan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian apa saja tugas dan wewenang kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan wewenang kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

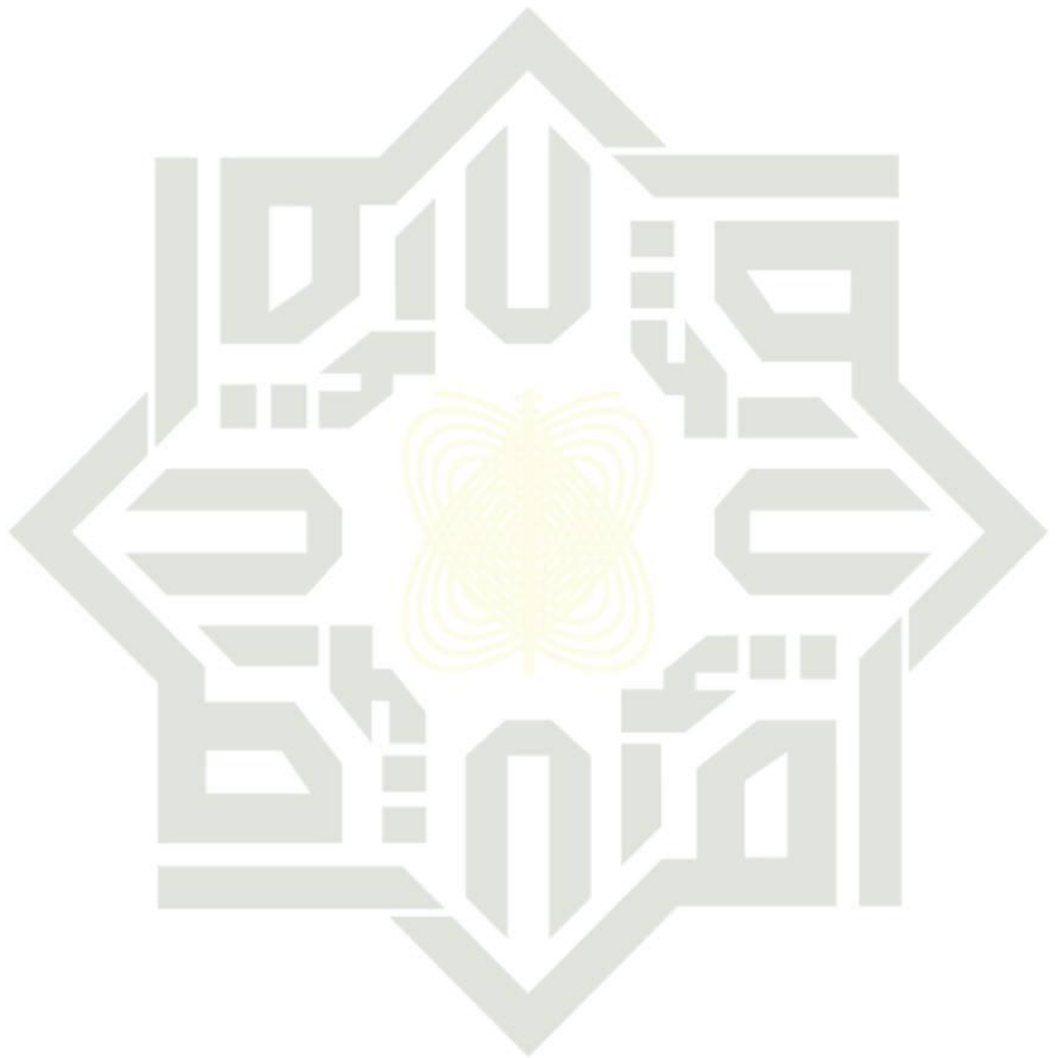
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam

penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

STRUKTUR DESA DAN ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Struktur Pemerintahan Desa

Adapun yang dimaksud Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Desa Pasal 1 ayat 1 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 jo. Pasal 25 dinyatakan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan, di mana Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.⁹

Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.¹⁰ Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

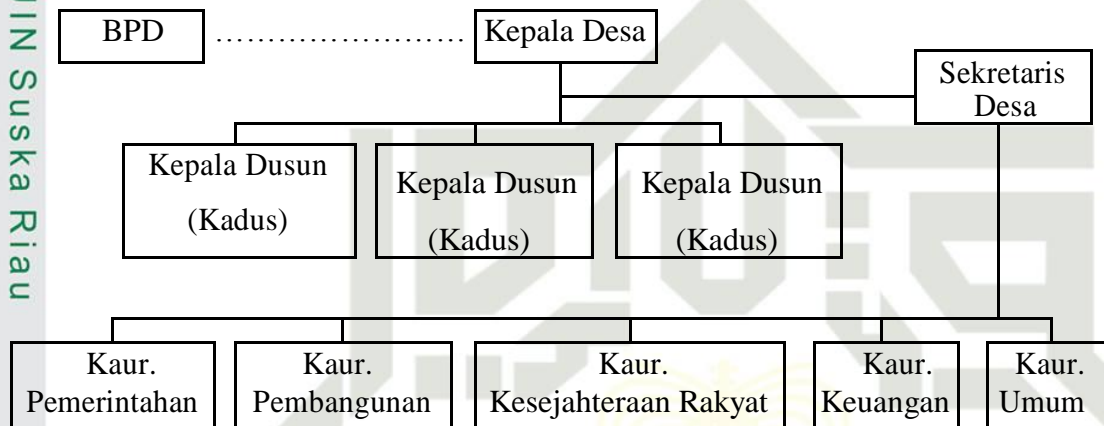
¹⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu (UU No. 6

Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

d. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun (Kadus) adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah:

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Kepala Urusan Pemerintah.

Tugas Kaur Pemerintah adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Urusan Pembangunan (Kaur. Pembangunan)

Tugas Kaur Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Mengelola tugas pembantuan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Kaur Kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama. Menyiapkan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kaur Keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

Kepala Urusan Umum

Tugas Kaur Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat desa.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.¹¹

¹¹ LSM, "Struktur Organisasi Desa", <http://keuanganlsm.com/struktur-organisasi-desa/> (Agustus 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini terdiri dari 16 bab, 122 pasal. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Jika dipahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat ditelusuri dari teks hukum pada **Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 angka 2** UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena disini ada dua konsep, yakni pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan, kedua, kepentingan masyarakat setempat.

Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan desa, apabila memperhatikan secara cermat teks hukum UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada **pasal 1 angka 1** memberikan batasan tentang desa berikut ini.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan **pasal 1 angka 1**, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Dasar yang digunakan adalah berdasarkan (1) prakarsa masyarakat, (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. Kemudian siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ? Pertanyaan ini dijawab dalam rumusan pada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Siapakah unsur lain dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 ?

Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksudkan unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kata kuncinya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pertanyaannya adalah karena kedua lembaga Kepala desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan, yakni pemerintahan desa, perlu diajukan siapakah yang dimaksud penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 ?

Pada bab 5 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 23 UU No 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . Hal ini ditegaskan juga pada Pemerintah Desa

Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain

Berdasarkan konstruksi hukum yang demikian, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni Kepala Desa dan BPD.

Untuk memahami, perlu dipahami konstruksi hukum terhadap kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada bab 4 tentang kewenangan desa **Pasal 18** UU no 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. kewenangan lokal berskala Desa.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 :

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21 :

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pada teks hukum Pasal 19 perlu dipahami konstruksi hukumnya, bahwa ada kewenangan yang diurus oleh desa dan ada kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota.

Pertanyaannya kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota meliputi apa saja ? Jika kita mengacu pada UU No 6 Tahun 2014, hal tersebut ditegaskan pada :

Pasal 22 yang menyatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Berdasarkan Pasal 22 ada empat penugasan yang bisa datang dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah (bisa Pemerintah Daerah Provinsi, bisa Pemerintah daerah Kabupaten Kota) yakni;

Pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa

Kedua , pelaksanaan pembangunan desa

Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa

Keempat, pemberdayaan masyarakat desa.

Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya, pertanyaannya dari mana biayanya ? Untuk memahami perlu dipahami oleh Kepala desa dan pembantu serta BPD apa yang dimaksud keempat penugasan tersebut diatas konsepnya? Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, yakni: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (**pasal 1 angka 8**). dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

(pasal 1 angka 12)

Siapa yang melaksanakan keempat hal tersebut di atas, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pada **Pasal 26 ayat (1)** Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pertanyaan selanjutnya kewenangan apa yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan keempat hal tersebut diatas ?

Pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal **26 ayat (3)** UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal **26 ayat (4)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kewenangan, hak, Kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditegaskan pada **Pasal 27** Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Agar Kepala Desa tidak “terjebak pada pelanggaran hukum” maka Kepala Desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan :

Pasal 29 UU no 6 Tahun 2014. Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan, maka perlu dipahami dan dilaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan oleh UU No 6 Tahun 2014 pada **Pasal 24** Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Agar penyelenggaraan Pemerintahan desa terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Didalam UU No 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada **Pasal 1 angka 5** yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Yang berperan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD. Oleh karena itu perlu pula dipahami apa tugas BPD berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pada :

Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPD diberikan hak pada :

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota diberikan hak dan kewajiban dan larangan sebagai berikut:

Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63 Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Hal yang penting adalah berkaitan dengan keuangan desa, pertanyaannya adalah dari mana penghasilan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 ?

Pasal 66:

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan Keuangan desa UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan tersendiri pada **BAB VIII** Keuangan Desa dan Aset Desa, mulai pasal. 71 s/d 74:

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Yang menjadi pertanyaan siapakah pemegang keuangan desa? pada

Pasal 75 UU No 6 Tahun 2014 menyatakan secara tegas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagaimana dengan segala peraturan perundangan yang berlaku selama ini, UU No 6 Tahun 2014 memberikan batasan berikut ini:

Pasal 119 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

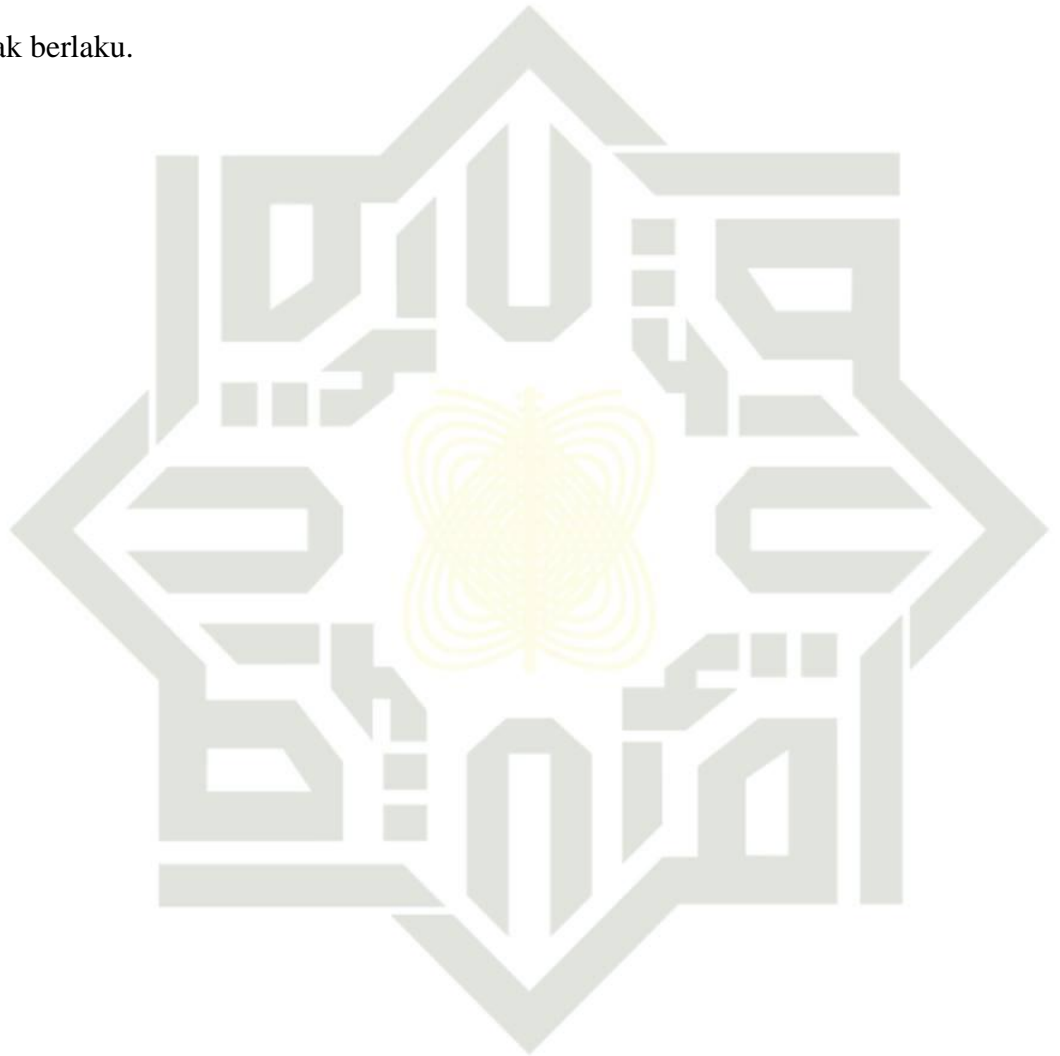
- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 121 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONSEP TEORITIS

A. Desa

1. Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.¹² Di samping itu, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹³ Sementara di dalam UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dengan demikian, kajian tentang desa dan segala problematika sosial, budaya, ekonomi dan berbagai perspektif lainnya, sudah banyak diulas oleh para ahli sosiologi, terutama bila dilihat dalam perspektif geografis dan karakteristik kehidupan masyarakatnya, oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat

¹² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 243.

¹³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 3

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pendapat tokoh sosiologi yaitu Ferdinand Tonnies pengertian desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “*gemeinschaft*” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat.¹⁵

Adapun pengertian Desa menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut UU. No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan NKRI.
- b. Sutardjo Kartohadikusuma; desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat “pemerintahan sendiri”.
- c. Paul. H. Landis, desa adalah sebagai wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai pengaruh hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
 - 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.

¹⁵ Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam, seperti iklim, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan bersifat agraris bersifat sembelan.
- d. Para ahli sosiologi, desa adalah sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu. Yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat dan mencakup tanah pertanian yang kadang dikuasai secara bersama.
- e. Ensiklopedia Nasional Indonesia, desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Desa pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
 - 2) Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
 - 3) Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
 - 4) Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari dirinya sendiri.
 - 5) Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka.
 - 6) Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih kuat.
- f. Menurut S. D. Misra, desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000 are.
- g. Menurut William Ogburn dan MF Nimkoff, desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.
- h. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

- i. Dalam kamus sosiologi; desa mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain di antara unsur-unsurnya, yang sebenarnya Desa masih dianggap sebagai standar dan pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian, kehidupan moral dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.¹⁶

2. Sejarah Terbentuknya Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.¹⁷

Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting manusia, yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga suami/ istri dan anak, serta sanak familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu tempat kediaman bersama. Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan

¹⁶ Suriyani, *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm.

¹⁷ Soetardjo, *Desa*, (Ghalia Indonesia : Jakarta 1984) hlm 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpindah-pindah terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua.¹⁸

Setidaknya ada tiga alasan pokok dari semula orang-orang membentuk masyarakat adalah : (1) untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan; (2) untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar; dan (3) untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Desa pertanian merupakan gejala desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuk desadesa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat pencahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran. Fakta sejarah menunjukkan bahwa dari abad ke abad desa telah berkembang menjadi kesatuan hukum yang melindungi kepentingan bersama atas penduduknya dilindungi dan dikembangkan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hukum itu memuat dua hal, yaitu: (1) hak untuk mengurus daerahnya sendiri, yang kemudian dikenal istilah “hak otonomi”, dan (2) hak memilih kepala

desanya sendiri. Di masa lalu hak otonomi itu mencakup banyak aspek, seperti hukum kekerabatan, hukum waris, hukum tanah, hukum perdata, dan hukum pidana pun termasuk di dalamnya. Antara otonomi desa

¹⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Jawa, Madura, dan Bali dengan desa lain bisa saja berbeda, misalnya di Sumatera Barat dikenal istilah desa ini dengan wilayah “nagari” yang mempunyai hukum adat yang berbeda dalam hal hak otonomi tersebut.

Desa pasar (jasa) tumbuh di sekitar tempat orang-orang bertemu satu sama lain untuk bertransaksi (di era modern disebut jual beli), sehingga terjadilah sebuah pasar yang terbentuk oleh masyarakat sekelilingnya. Di sekitar pasar tersebut kemudian berkembang menjadi desa perdagangan (jasa). Desa-desa tradisional juga sering terbentuk terkait dengan keberadaan sumber air atau sumber-sumber pencaharian lainnya, seperti pertambangan, pertambakan, dan sebagainya. Kadang-kadang alasan terbentuknya desa tercantum dalam nama desa, dari nama desa dapat diketahui alasan terbentuknya suatu masyarakat desa tertentu.¹⁹

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung, di Yogyakarta disebut dusun dan di Bali disebut banjar. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

¹⁹ Kartohadi Koesoemo, *Desa*, (Sumur Bandung : Bandung, 1965)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kedudukan Desa Dalam Struktur Ketatanegaran

Kedudukan Desa sebelum Kemerdekaan dan Zaman Kemerdekaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kedudukan desa perlu di lihat dari aspek historis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan dan zaman kemerdekaan.

Sebelum Kemerdekaan Pengaturan mengenai desa sebelum kemerdekaan di Indonesia telah ada dalam dua periode yaitu:

a. Zaman Hindia Belanda.

Pada zaman penjajahan Belanda terdapat peraturan perundangundangan mengenai desa yaitu *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura pada tahun 1906.²⁰ Aturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 *Regerings Reglement* (R.R) yang dikeluarkan tahun 1854 yang merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya desa, demokrasi, dan otonomi desa.

Pada tahun 1924, dalam perkembanganya *Regerings Reglement* (R.R) diganti dengan *Indische Staatsreggeling* (IS). Kemudian pasal 71 R.R diganti menjadi pasal 128 I.S.²¹ Berdasarkan pasal 128 I.S, Desa bumi putera dibiarkan memilih anggota-anggota pemerintahan desanya sendiri,

²⁰ Surya Ningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 1992) hlm 69

²¹ Hanafi Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga: Jakarta, 2011) hlm 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya (pasal 128 I.S ayat (1), selanjutnya kepala desa bumi putera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi (pasal 128 I.S ayat (3).

Berdasarkan ketentuan tersebut yang terdapat didalam pasal 128 I.S, desa dibiarkan sebagaimana adanya hanya diakui secara legal dalam hukum tata negara pemerintah kolonial Belanda. Meskipun diberi kebebasan dalam otonomi aslinya tetapi desa tetap dikontrol secara ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut Soenardjo menjelaskan, berdasarkan ketatanegaraan Hindia Belanda sebagaimana terdapat dalam Indische Staatsreggeling, pemerintah kolonial memberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada desa atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum pribumi dengan sebutan *Inlandsche Gemeente*. *Inlandsche Gemeente* didefinisikan sebagai “suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada hukum adat dan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah kabupaten atau swapraja”.²²

Pada tahun 1941 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi atau Undang-undang desa yang terkenal dengan sebutan Desa Ordonnantie. Berdasarkan ordonansi tersebut status desa diperkuat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih otonom. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai subordinat dari kekuasaan di atasnya tetapi diakui sebagai lembaga otonom pribumi yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²³ Desa *Ordonnantie* pada tahun 1941 tidak sempat dilaksanakan karena Hindia Belanda dikalahkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Sejak tahun 1942 kekuasaan beralih ke tangan tentara pendudukan Jepang.

- b. Zaman Jepang Sampai dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang tahun 1942, tidak ada peraturan baru mengenai desa. Bala tentara Jepang yang memerintah Indonesia menggantikan Hindia Belanda dengan waktu yang singkat yaitu 3,5 tahun tidak sempat membuat kebijakan baru.²⁴ Peraturan peninggalan Hindia Belanda yaitu IGO untuk desa-desa di Jawa dan Madura, dan IGOB untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku. Pemerintah Jepang dalam waktu yang singkat

²² Soenardjo, *Tinjauan singkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Tarsito:Bandung 1984) hlm 14

²³ Suhartono, *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta 2001) hlm 48-49

²⁴ Nurccholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga: Jakarta, 2011) hlm 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak banyak yang diperbuat dalam bidang pemerintahan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa hanya sedikit mengalami perubahan.²⁵ Ketentuan tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yaitu didalam pasal 2 yang berbunyi, “Pembesar Balatentara Dai Nipon memegang kekuatan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal”. Kemudian didalam Pasal 3 yang berbunyi, “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer”. Dengan pengaturan tersebut maka Desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan peraturan sebelumnya. Satu-satunya peraturan mengenai desa yang dikeluarkan oleh penguasa Jepang adalah *Osamu Seirei* No. 7 tahun 1944. Peraturan ini hanya mengatur tentang pemilihan Kepala Desa (Ku-tyoo) yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi empat (4) tahun.²⁶ pada zaman penjajahan Jepang desa ditempatkan di atas aza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Pemerintahan desa pada zaman Jepang lebih menekankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengerahan rakyat untuk kepentingan pemerintahan Jepang.

²⁵ Suryaningrat *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 1992)

²⁶ Suhartono *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah* (Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta 2001) hlm 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zaman Kemerdekaan

Desa dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) Pengaturan yang terkait dengan keberadaan desa pada masa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) tidak dapat dipisahkan dari berbagai pengaturan yang terkait dengan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan pembagian wilayah pemerintahan Republik Indonesia di daerah dalam susunan teritorial yang terdiri dari Provinsi, Keresidenan, Kotapraja (Swapraja), dan Kota (Gemeente).²⁷ sebagai berikut: 1) Daerah Republik Indonesia dibagi atas 8 (delapan) Provinsi, yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil; 2) Provinsi dibagi kedalam Keresidenan-keresidenan; 3) Kedudukan Kooti dan Kota diteruskan sesuai keadaan saat itu. Berdasarkan pembagian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Negara Indonesia terbagi atas Provinsi, Keresidenan, Kotapraja, dan Kota. Pada tanggal 23 Nopember 1945 ketika pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND), yang dalam penjelasan Pasal 1 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Daerah

²⁷ Sabon, *Hukum Otonomi Daerah*,(Universitas Atmajaya, Jakarta 2009) hlm1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan di Jawa dan Madura (kecuali di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Surakarta) di Keresidenan, di kota berotonomi.²⁸

Keberadaan KND dilaksanakan di Jawa, Madura, Keresidenan, Kota berotonomi dan Kabupaten serta daerah lain yang dipandang perlu oleh Menteri dalam Negeri.²⁹ Dengan demikian, untuk wilayah Propinsi, Kawedanan, Asistenan, Siku dan Ku dalam Kota tidak perlu diadakan KND. Hal tersebut berarti bahwa susunan daerah didalam Negara Indonesia tidak hanya terbatas pada Provinsi, Kepresidenan, Kotapraja, dan Kota saja, akan tetapi terdapat juga Kewedanan, Kecamatan, dan Desa tetap diakui. Dengan demikian, maka keberadaan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tetap diakui keberadaannya, meskipun belum ada pengaturan khusus yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asal-usulnya sebagai daerah istimewa sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945.

- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1948 dan di umumkan serta dinyatakan mulai berlaku pada saat itu juga.³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-

²⁸ <http://otonomidaerah.com/uu-nomor-1-tahun-1945-tentang-kedudukan-komite-nasional-daerah>

²⁹ Sujamto, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (PT Bina Aksara: Jakarta, 1988) hlm 4

³⁰ *Ibid*, hlm 25 – 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disebutkan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah; Provinsi, Kabupaten (kota besar) dan Desa (kota kecil, Nagari, Marga dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, angka 18 menjelaskan bahwa Daerah Otonom yang terbawah adalah desa, nagari, marga, kota kecil dan sebagainya.³¹ Ini berarti bahwa desa diletakkan dalam lingkungan pemerintahan modern, tidak ditarik diluarnya sebagaimana pada zaman Belanda. Jadi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pemerintah desa adalah satuan pemerintah terbawah di bawah pemerintah kabupaten (kota besar) dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang jelas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pengaturan desa mengacu kepada pemikiran Muh Yamin. Dimana desa ditempatkan sebagai pemerintahan kaki sebagaimana pemikiran Yamin, dengan pemerintahan tengahnya adalah kabupaten .³² Desa dijadikan daerah otonom (*local self government*), bukan dipertahankan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya (*self governing community*) sebagaimana pada zaman penjajahan. Desa ditarik ke dalam sistem pemerintahan, bukan dibiarkan tetap berada di luar sistem pemerintahan sebagaimana terjadi pada zaman kolonial. Namun karena sampai dengan

³¹ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt535643654ab84/parent/lt535643654ab84>

1823ab

³² Hanafi Nurcholis, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Eka Aksara, Jakarta, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir tahun 1950 negara Republik Indonesia masih sibuk melakukan konsolidasi, dan karena itu penataan desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 ini belum bisa dilaksanakan.

- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Pada tahun yang sama yaitu tahun 1965, selain dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 juga dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maksud utama yang hendak dicapai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 adalah untuk memberikan tempat dan kedudukan yang wajar kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu dalam rangka dan rangkaian ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak dimaksudkan sebagai Undang-undang pengaturan desa secara permanen, melainkan hanya sebagai Undang-undang transisi. Pembentukan daerah tingkat ketiga diawali dengan pembentukan desa praja. Desa praja akan diubah menjadi Daerah Tingkat III. Pada akhirnya jika, pembentukan daerah tingkat tiga sudah benar-benar dapat terbentuk, maka Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja tidak berlaku lagi.³³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak sempat dilaksanakan karena terjadi pergantian rezim yaitu rezim Orde Lama jatuh dan digantikan oleh rezim Orde Baru.

³³ Nurholis, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara: Jakarta 2011) hlm 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pada tanggal 1 Desember 1979 presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dan sebagai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara .³⁴ Pengaturan tentang pemerintah Desa diarahkan untuk memperkuat pemerintahan Desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin meluas dan efektif. Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa; Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pengertian tentang desa itu, maka desa memainkan dua peran yaitu sebagai masyarakat hukum yang menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangganya sendiri (*self governing community*), dan peran sebagai lembaga pemerintahan terendah dibawah camat (*local state government*). Hal ini senada dengan pendapat Hanif Nurcolis yang menyimpulkan bahwa kedudukan Desa dibawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah campuran, yaitu sebagai wilayah administratif (*local state government*), dan kesatuan masyarakat termasuk

³⁴Soemarno, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa dan Proses Kelahirannya*, (Sari Gaya Baru:Jakarta,1980) hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*).³⁵

Namun menurutnya lebih menonjol sebagai wilayah administrasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan secara tegas bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 juga tidak mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi yang sudah ada baik berupa kelembagaan pemerintahan maupun budaya dan adat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai wilayah administrasi karena desa ditempatkan di bawah wilayah administrasi kecamatan.

3. Desa dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen)

Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai tuntunan masyarakat agar dilakukan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang selama masa orde baru dirasakan tidak memihak pada rakyat. Berkaitan dengan kedudukan desa, maka dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa,

³⁵ Hanif Nurcolis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga: Jakarta, 2011) hlm 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perubahan Pasal 18 tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah diamandemennya Undang-undang Dasar Tahun 1945 termasuk Pasal 18, maka keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengormatan terhadap Desa.³⁶ Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diatur dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan. Kedudukan desa di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan

³⁶ Sadu dan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Fokus Media: Bandung, 2007) hlm 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 huruf (b) ayat 2 UUD 1945. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota. Walaupun dalam Undang-undang itu menegaskan tentang hak Desa untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat, tetapi implementasi pelaksanaan hak itu tidak diatur dengan jelas. Pada akhirnya penempatan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten/kota dalam hubungan pemerintahan. Dengan demikian, desa tidak memiliki perbedaan dengan kelurahan, yang sama-sama di bawah kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Desa dalam sejarahnya telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan tentang Desa, dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 83.931 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) Desa, (74.517 Desa, 919 nagari di Sumatera Barat, kemudian 8444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi).³⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

³⁷ www.forumdesa.org

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut mengatur mengenai

Pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat, hal ini terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pengaturan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan kedudukan desa berada diluar susunan NKRI yang hanya dibagi-bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Artinya, desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi tersebut, Desa dipahami terdiri atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (*self governing community*). Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam pasal 5 dinyatakan bahwa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Desa secara administratif berkedudukan dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota (*local self governmen*). Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Desa yang berada diwilayah Kabupaten/ Kota dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dimana berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dibagi atas dua pemerintahan daerah otonom yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Provinsi dibagi atas pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota tidak dapat ditafsirkan sebagai daerah otonom tingkat III atau suatu jenis pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, karena berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Untuk itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan sendirinya akan berada dibawah lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota. Kedudukan administrasi pemeritah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten/ Kota (*local self governmen*), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Oleh karena itu dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka pemerintah Desa secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asalusul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*) inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan. Selanjutnya didalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan dalam pasal 5 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

1. Hak Pemimpin

Hak pemimpin atas rakyat yang dia pimpin (dengan kata lain, kewajiban rakyat kepada sang pemimpin) itu di antaranya:

- a. Rakyat memiliki kewajiban untuk mencurahkan ketaatan kepada sang pemimpin, baik dzahir maupun batin, dalam setiap yang diperintahkan atau yang dilarang oleh pemimpin, kecuali dalam hal maksiat. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mewajibkan untuk taat kepada pemimpin, dan tidak memberikan pengecualian kecuali jika dalam hal kemaksiatan. Maka perkara (aturan) lainnya yang bukan maksiat, harus tetap ditaati. Allah Ta'ala befirman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian”. (QS. An-Nisa’ [4]: 59)³⁸

- b. Memberikan nasihat kepada sang pemimpin dengan metode dan adab yang baik.
- c. jihad bersama mereka, shalat di belakang mereka (karena pemimpin zaman dahulu adalah juga imam shalat), menunaikan sedekah (zakat mal) kepada mereka ketika diminta (maksudnya, ketika penguasa menarik harta zakat yang itu menjadi kewajibannya, melalui amil zakat yang ditunjuk, maka tetap ditaati), juga berhaji bersama mereka. Baik pemimpin baik adalah pemimpin yang shalih, ataupun pemimpin yang fajir, selama belum sampai derajat kekafiran.
- d. Tidak mengumbar, membeberkan, dan membongkar aib dan kejelekan mereka di khalayak umum.

4. Tanggung Jawab Pemimpin

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah swt. maupun hubungan dengan manusia, termasuk diantaranya

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah kepemimpinan di pemerintahan. Kepemimpinan merupakan suatu amanah, untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur dan baik. Dan tugas yang di amanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.³⁹ Dalam melaksanakan amanah dari masyarakat seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membuat bawahan dan masyarakatnya menjadi cerdas, sebab pemimpin bukan hanya seseorang yang disertai setumpuk kepercayaan dalam hal melakukan perubahan, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin itu harus jadi panutan atau *role of model* dan sumber pengetahuan. Berikut tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya.

- a. Pemimpin bekerja dengan orang lain : Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi.⁴⁰
- b. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (akontabilitas): Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.
- c. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas : Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun

³⁹ Thariq M As-Suwaikan dan faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Gema Insani: Jakarta, 2005) hlm. 301

⁴⁰ http://www.kompasiana.com/reksi_dwi/55100fbea33311cd39ba7ec0/tanggung-jawab-seorang-pemimpin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif.

- d. .Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual : Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
- e. Manajer adalah forcing mediator : Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
- f. Pemimpin adalah politisi dan diplomat: Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.
- g. Pemimpin membuat keputusan yang sulit : Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

3. Pemerintah yang Ideal

Sebagian besar ilmuwan politik Islam, bila mengambil rujukan model pemerintahan ideal dalam Islam, merujuk pada era khalifahurasyidin.

Khalifahurasyidin meninggalkan nilai-nilai universal dalam masalah pemimpin/kepemimpinan dan dalam pengelolaan negara, diantaranya; seorang pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas, dedikasi, prestasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbanan, dan kesalehannya. Jadi asas egaliter dan prinsip meritokrasi betul-betul mewarnai proses rekrutmen seorang pemimpin. Dengan kata lain rekrutmen berdasarkan hubungan darah atau keturunan sama sekali tidak dikenal.

Bentuk negara tidak diatur, yang kalau menggunakan istilah modern, apakah republik atau kerajaan, negara kesatuan atau federal, sistem presidensiil atau parlementer, oleh para ilmuwan politik Islam dimaknai sebagai mengikuti ruang dan waktu sepanjang mengikuti nilai-nilai universal di atas. Cara pandang seperti inilah yang mewarnai dialog antara dua tokoh Indonesia yang hidup pada zaman yang berbeda yang kemudian dibukukan dengan judul: "Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem".⁴¹

Jika tidak ada 'Negara Islam', lalu bagaimana negara yang Islami ? di sinilah sumber masalah yang sebenarnya, di satu sisi jika kita merujuk pada kondisi masyarakat saat Khalifahurasyidin hidup, jauh berbeda dengan saat ini. di sisi lain eksperimen model negara yang dipraktikan oleh Khalifahurasyidin terputus dalam rentang waktu yang panjang. Akibatnya sejak pasca Perang Dunia II, setelah umat Islam terbebas dari penjajahan, harus mulai dari nol. Paling tidak muncul model Turki, Pakistan, dan Indonesia. Sampai sekarang model-model ini terus disempurnakan, baik dengan alasan perbaikan, maupun karena tuntutan situasi yang berubah.

⁴¹ <http://Politik.rmol.id.cdn.ampproject.org.Bagaimana-bentuk-negara-yang-ideal-menurut-islam>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila dilihat dari stabilitas politik, Indonesia dan Turki jauh lebih maju dibanding Pakistan. Sedangkan bila dilihat dari konstitusinya sebagai landasan yuridis formal sebuah negara, maka Indonesia jauh lebih maju dibanding Turki, mengingat sampai sekarang konstitusi Turki masih menggunakan konstitusi sekuler warisan Atatürk yang mengharamkan membawa Tuhan pada urusan negara. Apalagi secara substansi maupun proses penyusunannya, Pancasila mirip dengan Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah bersama kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh agama. Piagam Madinah kemudian menjadi landasan yuridis formal dalam mengelola Negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah.

John L. Esposito, Tamara Sonn, dan John O Voll dalam *Islam and Democracy after the Arab Spring* bahkan menyebut Piagam Madinah bukan saja menghormati perbedaan agama dan suku, akan tetapi juga memberikan ruang bagi oposisi. Itulah sebabnya Piagam Madinah ditempatkan sebagai sebuah model konstitusi negara modern pertama di dunia oleh Robert N Bellah dalam bukunya *Beyond Belief*.⁴²

Ada juga ilmuwan politik yang menyebut bahwa Pancasila merupakan konstitusi yang dibangun di atas prinsip demokrasi dengan memasukkan nilai-nilai agama dan dibingkai oleh budaya bangsa. Bung Karno mencoba menggunakan bahasa universal, saat menjelaskannya kepada dunia internasional, melalui pidatonya di PBB, dengan menyebut Pancasila sebagai *5 principles* (fondasi):

⁴² <http://Politik.rmol.id.cdn.ampproject.org.Bagaimana-bentuk-negara-yang-ideal-menurut-islam>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Belief in God (Ketuhanan)
2. Nationalism (nasionalisme)
3. Humanity (kemanusiaan)
4. Democracy (demokrasi)
5. Social justice (keadilan sosial)

4. Otoritas dan Wewenang Pemimpin

Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang atau berwenang (*authoritative*), namun Max Weber lebih sering menggunakan Istilah otoritas daripada istilah kekuasaan. Otoritas berarti membuat agar orang lain mematuhi suatu perintah dengan maksud (isi) tertentu, sehingga apabila dibandingkan dengan kekuasaan maka kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Demikian pula jika dihubungkan dengan suatu organisasi misalnya negara.

Suatu organisasi atau negara tidak akan dapat menjalankan fungsi jika tidak disertai dengan otoritas, sehingga otoritas mempunyai arti penting. Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan. Dengan demikian dalam suatu pemerintahan otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan.⁴³ Karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan. Menurut Max Weber keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (legitimasi) dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang

⁴³H. G. Surine, *Ilmu Administrasi Negara Suatu Bacaan Pengantar*, (Pt. Gramedia Jakarta, 1987) hlm 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat. Jadi otoritas Itu menuntut adanya ketaatan. Otoritas yang tahan lama ialah otoritas yang sah. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.

Dasar otoritas atau wewenang adalah suatu sistem hukum yang berlaku disuatu negara. Suatu sistem hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti agama, tradisi, kebudayaan dll, sehingga sistem hukum itu akan diakui dan ditaati oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dalam sistem hukumnya diatur kedudukan orang-orang yang memegang kekuasaan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas, sehingga rotasi kekuasaan akan berjalan dengan demokratis dan adanya kemungkinan seseorang memegang kekuasaan dalam Jangka waktu yang lama sekali dapat dihindari. Hal ini membedakannya dengan masyarakat tradisional.⁴⁴

⁴⁴ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (CV.Rajawali:Jakarta, 1989) hlm 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Kedudukan Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai: Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pemimpin Masyarakat.
2. Tugas dan wewenang kepala desa berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu: Kepala Desa berwenang memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, kemudian kepala desa sebagai fungsi regulasi desa, serta membina dan meningkatkan perekonomian desa dan membina kehidupan masyarakat desa.
3. Analisis fiqh Siyasah terhadap Tugas dan wewenang Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada dua poin yaitu: -menyelenggarakan pemerintahan merupakan suatu amanat dan -memimpin berarti siap melayani masyarakat.

B Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, penulis bermaksud memberi saran, untuk lembaga pemerintahan maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan yang ada di dalam UU No.6/2014 ini sudah baik, hanya saja penulis menyarankan kepada pemerintahan daerah beserta anggota DPRD Kab/Kota untuk lebih mengontrol dan mengawasi jalannya aturan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di dalam undang-undang tersebut agar undang-undang tersebut terlaksana dengan baik.

2. Untuk kepala desa dan perangkatnya penulis menyarankan agar meningkatkan kualitas, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kedisiplinan yang tinggi serta dilandasi dengan pengabdian, dedikasi serta taat pada setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga perlu lebih diperhatikan dibidang pelayanan, karena menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, karena hakikatnya memimpin berarti siap melayani masyarakat, dan diaplikasikan melalui pelayanan yang ramah, tepat waktu, prosedur pelayanan dipermudah dan lain sebagainya.
3. Penulis hanya meneliti tentang tugas dan wewenang kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih jauh tentang konsep pengelolaan pemerintahan desa menurut undang-undang no.6/2014 dan pengawasan terhadap jalannya aturan yang ada di dalam undang-undang serta sanksi bagi pemerintah desa yang tidak menjalankan aturan sesuai yang diatur di dalam undang-undang no.6/2014.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Jazair, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2017. *Aisar At-Tafsir Li Al-Kalami Al-aliyyi Al-kabir*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2008 *Legalitas Politik: Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah, Rozali. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Sadlan, Shahih bin ghanim. 2002. *Aplikasi Syariat Islam*. Jakarta: Dar Al-Falah
- Dewi, Arnita. 2006. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Yogyakarta: Ak Group
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jawa Barat: Kota Bekasi
- <https://amp.tirto.id/pemerintah-desa-dinilai-masih-lemah-lAe>
- [Http://otonomidaerah.com/uu-nomor-1-tahun-1945-t2ntang-kedudukan-komite-nasional-daerah](http://otonomidaerah.com/uu-nomor-1-tahun-1945-t2ntang-kedudukan-komite-nasional-daerah)
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt535643654ab84/parent/lt535643623ab>
- Iqbal, Muhammad. 2004. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana,
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Cet.ke I; Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Koesoemo, Kartohadi. 1965 *Desa*, (Sumur Bandung : Bandung,
- LSM, “*Struktur Organisasi Desa*”, <http://keuanganlsm.com/struktur-organisasi-des/> (24 Agustus 2017).
- Murcholis, Hanafi. 2011. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta,
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi aksara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ningrat, Surya. 1992 *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (PT Rineka Cipta: Jakarta.)
- Nurcholis, Hanafi. 2011 *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga: Jakarta.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Kepemimpinan menurut islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Purnomo, Joko. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Republik Indonesia, UU RI nomor 6 Tahun 2014.
- Rasyid Masri, Abd. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Stain Ponorogo
- Soemarno. 1980. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa dan Proses Kelahirannya*. Sari Gaya Baru:Jakarta.
- Surine, H. G. 1987 *Ilmu Administrasi Negara Suatu Bacaan Pengantar*,(Pt.Gramedia :Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono. 1989. *Pengantar Sosiologi*. CV.Rajawali:Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Seratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, cet.Ke III
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia,
- Sriyani, 2013. *Sosiologi Pedesaan* . Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Soetardjo, 1984. *Desa*,Ghalia Indonesia : Jakarta
- Soenardjo. 1984 *Tinjauan singkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito:Bandung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhartono. 2001 *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta).

Suryaningrat. 1992 *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Suhartono. 2001 *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Suhamto. 1988. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT Bina Aksara: Jakarta.

Silalahuddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*,

W. J. S. Poerwadarminta, 1985. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.

Widjaja, HAW.2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo,

Widodo, Joko. 2001. *Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. CV.Citramedia :Surabaya.

Wahid, Muh.Abduh. *Etika Politik dalam Perspektif Hadis*.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23240
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5161/2019 Tanggal 27 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

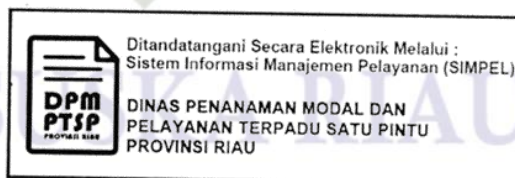
1. Nama : **NORDI ILHAMI**
2. NIM / KTP : **11524104165**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OLEH KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **PUSTAKA WILAYAH SOEMAN HS PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Mei 2019



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah ditulis oleh saudara:

Nama : **NORDI ILHAMI**
NIM : **11524104165**
Program Studi : **Hukum Tata Negara Siyasah**
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : **Senin, 20 Mei 2019**
Narasumber : **Dr. Mohd. Yunus, M.Ag**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag., M.Si
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 22 Mei 2019
Narasumber

Dr. Mohd. Yunus, M.Ag
NIP. 195912311987031037

- Hak Cipta UIN Suska Riau
1. Dilarang menungcip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5852/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NORDI ILHAMI
N I M : 11524104165
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

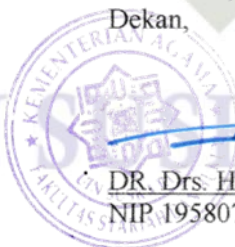
UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **20 JUNI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 18 Juli 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Januari 2020

Uin 04/F.I.1/PP.01.1/736/2019
(satu) rangkap
Nilai Skripsi

Kepada
Yth. Sdr, Dr. ARISMAN, M.Sy
Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat,

Berhubung skripsi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : NORDI ILHAMI
N I M : 11524104165
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)
Judul Skripsi : KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Telah sampai kepada fakultas, kami mohon kiranya saudara berkenan mengirimkan nilai skripsi mahasiswa tersebut dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir dalam waktu dekat ini mahasiswa tersebut akan dipanggil untuk munaqasyah.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,
an.Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.Ci
NIP.19660803 199303 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 - 04 - 2020

Nomor : (satu) rangkap
Lampiran :
Perihal : **Nilai Skripsi**

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I.1/PP.01.1/736/2019, tanggal 20 Januari 2020 perihal yang sama pada pokok surat, dengan ini kami kirimkan sebagai berikut :

Nama : NORDI ILHAMI
NIM : 11524104165
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)
Nilai Skripsi : Nilai Angka : 88 Nilai Huruf : A

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Dosen Pembimbing



Dr. ARISMAN, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Keterangan Nilai :

Nilai A ; Bila Angka Antara 85-100
Nilai A-; Bila Angka Antara 80 – 84
Nilai B+; Bila Angka Antara 75-79
Nilai B; Bila Angka Antara 70-74
Nilai B-; Bila Angka Antara 65-69
Nilai C+; Bila Angka Antara 60-64
Nilai C; Bila Angka Antara 55-59
Nilai D; Bila Angka Antara 50-54
Nilai E; Bila Angka Antara 0-49



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 462 Telp./Fax. (0761) 34068
Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26613

PEKANBARU

Kode Pos: 28126

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : Pemerintah Provinsi Riau Dinas
Perencanaan, Mediatika dan Kearsipan
No. Surat : 503/DPNPTSP/Non 1214-P/11/2019
Tgl Surat : 27 Mei 2019

Diterima Tgl : 27 Mei 2019 (12.05 WIB)

No. Agenda : 454

Sifat :

☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengumpulan data untuk bahan skripsi

Diteruskan Kepada Sdr :

- ☐ Sekretaris
- ☒ Kabid. Perpustakaan
- ☐ Kabid. Pembinaan dan Pelayanan Arsip
- ☒ Kabid. Akuisisi dan Penyimpanan Arsip
- ☐ Kabid. Dokumentasi
- ☐ Ka. UPT Pelayanan Perpustakaan
- ☐ Kasubbag. Perencanaan Program
- ☐ Kasubbag. Keuangan dan Perlengkapan Barang Milik Daerah
- ☐ Kasubbag. Kepegawaian dan Umum
- ☐ Kasi. Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan
- ☐ Kasi. Otomasi, Preservasi, Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan
- ☐ Kasi. Pembinaan dan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Minat Baca
- ☐ Kasi. Pembinaan Kearsipan
- ☐ Kasi. Layanan Informasi & Jasa Kearsipan
- ☐ Kasi. Pendayagunaan dan Perlindungan Akses Arsip
- ☐ Kasi. Akuisisi Arsip
- ☒ Kasi. Pengolahan Arsip
- ☒ Kasi. Penyimpanan dan Perawatan Arsip
- ☐ Kasi. Dokumentasi Perpustakaan
- ☐ Kasi. Dokumentasi Kearsipan
- ☐ Kasubbag. TU UPT Pelayanan Perpustakaan
- ☐ Kasi. Pelayanan Perpustakaan

Instruksi :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Koordinasi / Konfirmasi
- ☐ Konsultasikan / Evaluasi / Saran Pendapat
- ☐ Dipedomani / Diketahui
- ☐ Diumumkan / Diedarkan / Copy
- ☐ Diarsipkan / difilekan

Informasi :

.....

karbag kep g & umum
kehidupannya
28/5 2019
Arahkan plg
ke bagian
kurva kebukh
28/5 2019



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NORDI ILHAMI**

NIM : **11524104165**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

Judul : **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Pembimbing : **Dr.Arisman, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama **Nordi Ilhami**, lahir di Kampung Baru Koto, 13 Januari 1996 . Merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Anak dari Bapak Maranis dan Ibu Megawati.M, S.Pd

Riwayat Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut : Pada tahun 2008 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 001 Pasar Inuman, Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Mts di Pondok Pesantren Tariyah Islamiyah Malalo dan pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan 4 tahun di Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Tariyah Islamiyah Malalo. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pada tanggal 16 juli – 31 Agustus melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Hingga pada tanggal 15 Juni 2020 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi **“KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dibawah bimbingan Bapak Dr.Arisman, M. S., yang dinyatakan **“LULUS”** dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat” sangat memuaskan” dengan IPK 3,34.